

Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Yogyakarta Tahun 2007-2023

Aprilia Hutagaol¹ Jesaya Kemalemta Karo-Karo² Jesika³ Nasrullah Hidayat⁴ Sentarina Damanik⁵ Silvia Agustin Manullang⁶

Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: apriliahutagaol892@gmail.com¹ jkemalemta@gmail.com² jesikamilala123@gmail.com³ nasrullah@unimed.ac.id⁴ sentarina02@gmail.com⁵ silviajeon98@gmail.com⁶

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendemonstrasikan pengaruh angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2007 hingga 2023. Teknik linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. variabel. Alat analisis perangkat lunak Eviews 12 digunakan dalam proses analisis penelitian ini. Kumpulan data pada tahun 2007–2023 merupakan sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan substansial antara partisipasi angkatan kerja dengan kemiskinan, namun justru berdampak negatif. Sementara itu, terdapat hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum dengan ukuran kemiskinan. Terkait dengan upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja, variabel kemiskinan menurun drastis. Variabel keterikatan kemiskinan paling besar dipengaruhi oleh upah minimum dan tingkat partisipasi angkatan kerja (83,20%). Sementara itu, 16,8% kesejahteraan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Jumlah Angkatan Kerja, Upah Minimum, Jumlah Penduduk Miskin

Abstract

The purpose of this study is to determine and demonstrate the impact of the labor force and minimum wage on the level of poverty in DI Yogyakarta Province between 2007 and 2023. The multiple linear technique is used to ascertain the impact of the independent variable on the dependent variable. The Eviews 12 software analysis tool was utilized in this study's analytical process. A collection of data spanning the years 2007–2023 is the data source. The results of the research indicate that there is no substantial relationship between the labor force participation and poverty, but rather a negative impact on it. In the meantime, there is a negative relationship and significant association between the minimum wage and the poverty measure. In relation to the minimum wage and labor force participation rate, the poverty variable declined dramatically. The poverty attachment variable is most influenced by the minimum wage and labor force participation rate (83.20%). Meanwhile, 16.8% of welfare is impacted by factors that are not addressed in this study.

Keywords: Number of Labor Force, Minimum Wage, Number of Poor People



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Jumlah pekerja merupakan indikator penting dari situasi perekonomian suatu negara. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, namun juga dapat menyulitkan bila tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai. Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang unggul dalam hal angkatan kerja. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), angkatan kerja Indonesia terus bertambah. Menurut data terakhir, diperkirakan akan mencapai sekitar 140 juta orang pada tahun 2023. Indonesia berada dalam fase bonus demografi, di mana usia produktif mendominasi populasi. Ini berarti potensi

angkatan kerja masih akan terus meningkat hingga 2030. Terkait angkatan kerja kami malakukan penelitian angkatan kerja di Yogyakarta dimana, Angkatan kerja di Yogyakarta memiliki potensi yang besar dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan budaya yang mendukung. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu di addresssed, seperti mismatch keterampilan dan penciptaan lapangan kerja.

Grafik 1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Yogyakarta Tahun 2007-2023

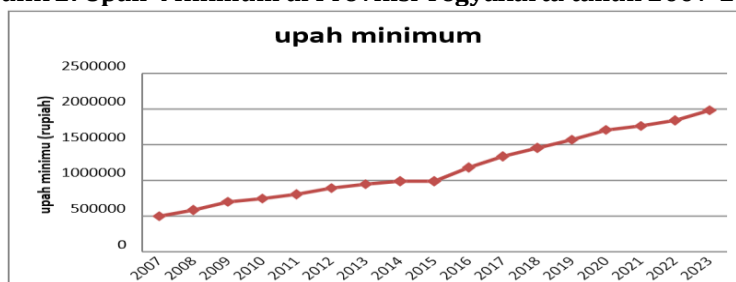


Sumber: Data BPS

Berdasarkan data jumlah Angkatan Kerja dari BPS Provinsi Yogyakarta tahun 2007-2023, dapat ditemukan bahwa Jumlah Angkatan Kerja di Yogyakarta memiliki nilai yang berfluktuasi dan cenderung meningkat dari tahun 2007 hingga 2023. Terhitung dari tahun 2015, nilai Angkatan Kerja di Yogyakarta berada pada angka 68,38%. Lalu terjadi peningkatan di tahun 2017 ke angka 71,69%. Namun terjadi penurunan nilai angkatan kerja pada tahun selanjutnya yang berada pada angka 71,12% pada tahun 2020. Hingga pada tahun 2023 tingkat angkatan kerja di provinsi Yogyakarta berada pada angka 74,08% yang mana ini merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2007-2023 (BPS, 2023). Berdasarkan pembahasan jumlah tenaga kerja di atas, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi fluktuasi jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah. Faktor-faktor berikut mempengaruhi jumlah angkatan kerja:

1. Pertumbuhan Penduduk, Peningkatan populasi, khususnya usia kerja (15-64 tahun), secara langsung meningkatkan jumlah angkatan kerja. Indonesia mengalami bonus demografi di mana usia produktif mendominasi, sehingga angkatan kerja diprediksi terus meningkat.
2. Struktur Umur, Proporsi usia muda yang besar dalam populasi berkontribusi pada tingginya angkatan kerja. Di sisi lain, proporsi lansia yang tinggi dapat menurunkan angkatan kerja.
3. Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi yang positif umumnya menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga meningkatkan jumlah angkatan kerja.
4. Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, seperti program pelatihan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dapat memengaruhi jumlah angkatan kerja.
5. Kondisi Pasar Tenaga Kerja, Ketersediaan lapangan pekerjaan dan tingkat upah yang kompetitif dapat menarik lebih banyak orang untuk memasuki angkatan kerja.

Grafik 2. Upah Minimum di Provinsi Yogyakarta tahun 2007-2023

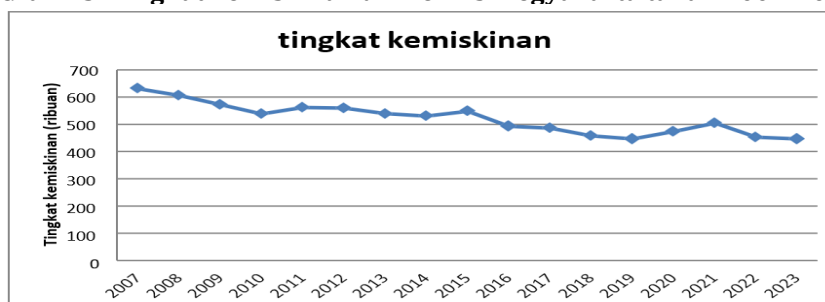


Sumber: data BPS

Berdasarkan grafik 2 data Upah minimum dari BPS Provinsi Yogyakarta tahun 2007-2023, dapat ditemukan bahwa Jumlah Angkatan Kerja di Yogyakarta memiliki nilai yang terus meningkat. Terhitung dari tahun 2007, nilai Angkatan Kerja di Yogyakarta berada pada angka 500.00 terjadi peningkatan sampai tahun 2023 yakni sebesar 1.981.782 yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2007-2023 (BPS, 2023). Upah minimum merupakan kebijakan penting yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi, meningkatkan standar hidup mereka dan meningkatkan daya beli masyarakat. Penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan berbagai kalangan. Upah minimum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kebutuhan Hidup Dasar (KHL) Merupakan tingkat kebutuhan minimal yang dibutuhkan pekerja untuk dapat hidup layak. KHL meliputi biaya pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan kebutuhan lainnya.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa secara umum. IHK digunakan untuk mengukur inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Dengan memperhitungkan IHK, upah minimum bisa disesuaikan untuk meningkatkan biaya hidup.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nilai PDRB turut menjadi pertimbangan penetapan upah minimum. Semakin tinggi PDRB, semakin besar kemampuan daerah untuk membayar upah minimum yang lebih tinggi kepada pekerja.

Grafik 3. Tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta tahun 2007-2023



Sumber: Data BPS

Berdasarkan grafil 3 data Tingkat Kemiskinan dari BPS Provinsi Yogyakarta tahun 2007-2023, dapat ditemukan bahwa Jumlah Angkatan Kerja di Yogyakarta memiliki nilai yang semakin menurun. Terhitung dari tahun 2007, nilai tingkat kemiskinan di Yogyakarta berada pada angka 633,5ribuan jiwa. Lalu terjadi penurunan di tahun 2010 ke angka 540,5ribuan jiwa. hal tersebut terus menurun hingga pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di provinsi yogyakarta berada pada angka 448,47 yang mana ini merupakan angka terendah sepanjang tahun 2007-2023 (BPS, 2023). Kemiskinan di Yogyakarta masih menjadi masalah yang kompleks. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, bisa dilihat dari sisi makro dan mikro. Berikut beberapa faktor penyebab kemiskinan:

1. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata, Ketimpangan kepemilikan sumber daya dan kekayaan antar kelompok masyarakat. Ini menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki sumber daya terbatas.
2. Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi, Peningkatan penduduk yang tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bisa menyebabkan kemiskinan.
3. Keterbatasan Lapangan Kerja, Kurangnya kesempatan kerja formal yang layak dengan upah mencukupi.

4. Krisis Ekonomi dan Bencana Alam, Kondisi ini dapat mengganggu pendapatan dan sumber penghidupan masyarakat.
5. Akses Pendidikan yang Rendah, Pendidikan yang rendah membatasi kesempatan kerja yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi.
6. Keterampilan Kerja yang Terbatas, Kurangnya keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja membuat seseorang kesulitan bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
7. Masalah Kesehatan, Kondisi kesehatan yang buruk dapat mengganggu produktivitas dan kemampuan bekerja.
8. Masalah Sosial, Diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis dapat membuat seseorang terjebak dalam kemiskinan.
9. Kurangnya Modal Usaha, Minimnya modal untuk memulai atau mengembangkan

Tinjauan Teoritis Angkatan Kerja

Kelompok orang yang berusia antara 15 dan 64 tahun yang bekerja atau sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau bersiap untuk meluncurkan usaha baru dikenal sebagai angkatan kerja. Komposisi penduduk menentukan besar kecilnya angkatan kerja. Ada lebih banyak orang yang bekerja ketika ada angkatan kerja yang lebih besar. Dengan bertambahnya jumlah pekerja, diyakini akan meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angkatan kerja juga terdiri dari penduduk setempat yang mampu dan berkeinginan untuk bekerja. Menurut Adriyanto dkk. (2020), tenaga kerja yang "mampu" adalah tenaga kerja yang bersedia bekerja baik secara aktif maupun pasif serta mampu secara fisik, psikologis, dan hukum. Ia juga mempertahankan kemampuan untuk memilih dan melakukan tugas yang dilakukannya.

Teori Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi diawali dengan distribusi sumber daya manusia yang efektif yang dikenal dengan istilah penyerapan tenaga kerja. Meskipun Thomas Robert Malthus (1766–1834) adalah murid Adam Smith, tidak semua teori Malthus sejalan dengan teori Smith. Malthus menyatakan bahwa kemajuan manusia melampaui kemajuan pertanian sebagai sarana penyediaan kebutuhan. Tumbuhan menghasilkan makanan secara numerik (2 menjadi 4, 6, 8, dst.), sementara manusia tumbuh secara eksponensial (2 menjadi 4, 8, 16, dst.). Malthus memproyeksikan bahwa umat manusia pada akhirnya akan mengalami kelaparan karena pertumbuhan populasi melebihi pasokan pangan (Subri, 2017). Menurut teori Keynes (1883–1946), pasar tenaga kerja tidak berfungsi sesuai dengan konsepsi konvensional, sehingga tidak ada mekanisme penyesuaian yang menjamin perekonomian mencapai keseimbangan pada tingkat kesempatan kerja penuh. Di mana pun ada pekerja, pasti ada serikat pekerja yang memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Tingkat pendapatan masyarakat menurun seiring dengan penurunan tingkat upah. Daya beli sebagian masyarakat menurun ketika pendapatannya menurun, sehingga menyebabkan harga pangan turun saat mereka mengonsumsi makanan.

Upah Minimum Regional

Pedoman upah minimum organisasi komersial dan tingkat gaji yang ditentukan oleh suatu daerah dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR). Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk melindungi hak pekerja atas kompensasi yang adil dan sebagai jaring pengaman. Gaji minimum adalah upah minimum bulanan yang menggabungkan (1) gaji pokok tanpa tunjangan dan (2) gaji pokok dengan anggaran tetap, sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015

tentang Pengupahan pasal 41. Agar pekerja mencapai “ upah layak,” atau tingkat pendapatan yang memungkinkan mereka menghidupi diri sendiri, maka upah minimum harus mencukupi. Di pasar monopoli, gaji yang rendah dapat menghalangi pekerja, khususnya mereka yang memiliki tingkat keterampilan rendah. Pengusaha dan pelaku industri lainnya membayar upah minimum kepada pekerjanya sebagai kompensasi normal bagi tenaga kerja mereka. Tujuan utama penetapan upah minimum adalah untuk memberikan standar hidup minimum, yang mencakup kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Kementerian Ketenagakerjaan No. Per 01/Men/1999 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjadi landasan peraturan upah minimum di Indonesia.

Kemiskinan

Ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar hidup rata-rata di komunitasnya karena keterbatasan keuangan dikenal sebagai kemiskinan. Kondisi ini ditandai dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran penting. Kesempatan untuk mencapai standar hidup lainnya, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan yang tinggi di masyarakat, juga berkurang karena rendahnya gaji. Masyarakat dengan pendapatan jauh di bawah rata-rata mempunyai sedikit peluang untuk berkembang dalam keadaan seperti itu (Suryawati, 2004).

Hubungan Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan

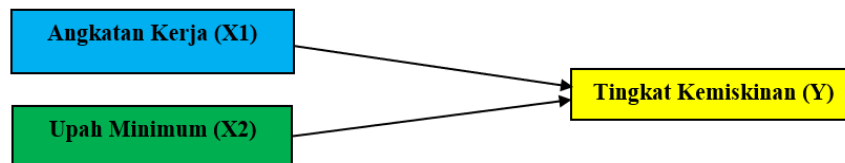
Tingkat Keterlibatan Angkatan Kerja (TPAK) merupakan metrik yang digunakan untuk memantau perubahan keterlibatan penduduk usia kerja dalam angkatan kerja. TPAK adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja terhadap jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi atau tergolong bekerja (yaitu bekerja atau mencari pekerjaan). Arsyad (2015) Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah persoalan sedikitnya kesempatan kerja. Sumarsono (2007) mendefinisikan angkatan kerja sebagai kelompok penduduk yang siap dan mampu bekerja. Arsyad (2015). Pengentasan kemiskinan tidak selalu disebabkan oleh tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. (Adi Lopan Ginting 2020) menyelidiki hubungan antara kesempatan kerja dan harapan hidup serta kemiskinan, dan menemukan bahwa meskipun tidak signifikan secara statistik, pekerja mempunyai dampak positif terhadap kemiskinan di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini berarti kemiskinan tidak akan meningkat sebanding dengan jumlah angkatan kerja.

Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Pendapatan masyarakat akan meningkat jika upah minimum diberlakukan, dan hal ini diyakini akan memungkinkan mereka memberikan kontribusi kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Menurut Yacoub (2012), pengangguran dan kemiskinan seringkali berkaitan karena pendapatan seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya jika bekerja. Tesis Boediono (2014) menyatakan bahwa menaikkan upah minimum merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan nasional, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Menurut Gindling dan Terrell (2010), para ekonom yang menganut pandangan ini percaya bahwa upah minimum menyebabkan kekakuan upah, memperlambat penciptaan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Dampak upah minimum provinsi, kesehatan, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia dipelajari oleh (Nadia Ismail, 2019). Menurut penelitian, upah minimum provinsi secara signifikan dan menguntungkan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak selalu diikuti dengan kenaikan upah minimum provinsi. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya Upah Minimum Provinsi di Indonesia bagi

masyarakat miskin. Gaji yang rendah bermanfaat dan secara signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan studi ini, tidak terjadi penurunan angka kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan kenaikan upah minimum provinsi. Hal ini bisa terjadi akibat adanya PHK akibat kenaikan upah minimum (PHK) sehingga meningkatkan angka pengangguran. Dampaknya, angka kemiskinan akan meningkat.

Kerangka Berpikir



Pengaruh variabel independen terhadap derajat kemiskinan (y) di Provinsi Yogyakarta meliputi tenaga kerja (X_1) dan gaji minimum lokal (X_2). $Y = f(X_1, X_2)$ merupakan model yang menjelaskan persamaan fungsi. Pengaruh setiap variabel independen mempunyai nilai positif dan negatif. Lebih spesifiknya, berikut adalah cara masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen:

1. Garis kemiskinan (Y) akan turun jika angkatan kerja (X_1) meningkat.
2. Garis kemiskinan (Y) akan turun jika upah minimum provinsi (X_2) naik.

Setelah literatur di atas ditinjau, kerangka teori yang menguraikan hubungan antara variabel-variabel penelitian dibuat.

Hipotesis

1. H_0 = Jumlah penduduk miskin di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 tidak dipengaruhi oleh angkatan kerja.
2. H_1 = Antara tahun 2007 dan 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi DI Yogyakarta berdampak pada jumlah penduduk miskin.
3. H_0 = Tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, upah minimum tidak berpengaruh terhadap proporsi penduduk miskin di provinsi DI Yogyakarta.
4. H_1 = Tahun 2007 hingga 2023, upah minimum berdampak terhadap proporsi penduduk miskin di Provinsi DI Yogyakarta.
5. H_0 = Jumlah penduduk miskin di Provinsi DI Yogyakarta antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2023 tidak dipengaruhi baik oleh tingkat partisipasi angkatan kerja maupun upah minimum.
6. H_1 = Tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum mempunyai pengaruh yang simultan dan simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi DI Yogyakarta. Dari tahun 2007 hingga 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis dibuat dan diuji kebenarannya untuk mengumpulkan bukti korelasi antar variabel dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Mulyadi, 2011). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta menyediakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara tahun 2007 dan 2023. Regresi linier berganda merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan bantuan *eviews* 12 dapat dilakukan uji asumsi tradisional (autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas), uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Memprediksi variabel independen (X_1, X_2) yang mempengaruhi variabel dependen (Y) dapat dilakukan dengan cara ini.

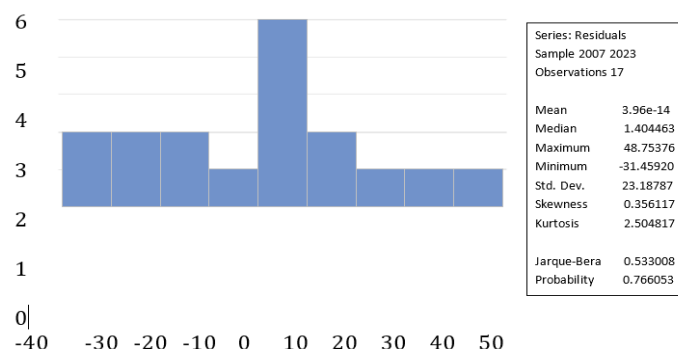
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perkembangan Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Miskindi Provinsi DI Yogyakarta tahun 2007-2023

Angkatan Kerja (persen)	Upah minimum (Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (ribuan)
68.56	500000	633.5
70.51	586000	608.9
70.23	700000	574.9
69.76	745694	540.5
70.39	808000	564.3
71.52	892660	562.1
69.29	947114	541.9
67.65	988500	532.6
68.38	988500	550.23
71.96	1182510	494.94
71.52	1337645	488.53
73.12	1454154	460.1
72.72	1570923	448.47
71.12	1704608	475.72
73.52	1765000	506.45
72.6	1840916	454.76
74.08	1981782	448.47

Sumber: Data BPS

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probabilitas sebesar 0,76 ($>0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 03/30/24 Time: 09:59			
Sample: 2007 2023			
Included observations: 17			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	118829.2	3287.446	NA
ANGKATANKERJA	26.11739	3644.351	2.424071
UPAHMINIMUM	4.22E-10	18.56087	2.424071

Dari hasil analisis regresi diketahui nilai VIF variabel independen sebesar $2.42 < 10.00$ makadapat disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinieritas sudah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	0.964547	Prob. F(2,14)	0.4051
Obs*R-squared	2.058787	Prob. Chi-Square(2)	0.3572
Scaled explained SS	1.050566	Prob. Chi-Square(2)	0.5914

Hasil analisis regresi yang diketahui dengan nilai probabilitas obs*R-Squared adalah 0,35 (>0,05), sehingga dapat disimpulkan uji heteroskedastisitas terpenuhi atau uji heteroskedastisitas dinyatakan lulus.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	1.245995	Prob. F(2,12)	0.3223
Obs*R-squared	2.923259	Prob. Chi-Square(2)	0.2319

Berdasarkan hasil regresi diketahui nilai probabilitas obs*R-Squared sebesar 0.23 (>0.05) maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi sudah terpenuhi atau sudah lolos uji autokorelasi.

Hasil Uji Regresi

Dependent Variable: KEMISKINAN				
Method: Least Squares				
Date: 03/30/24 Time: 09:58				
Sample: 2007 2023				
Included observations: 17				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	685.4585	344.7162	1.988472	0.0667
ANGKATANKERJA	-0.498066	5.110517	-0.097459	0.9237
UPAHMINIMUM	-0.000108	2.05E-05	-5.273838	0.0001
R-squared	0.832043	Mean dependent var		522.7276
Adjusted R-squared	0.808049	S.D. dependent var		56.57981
S.E. of regression	24.78888	Akaike info criterion		9.417452
Sum squared resid	8602.837	Schwarz criterion		9.564490
Log likelihood	-77.04834	Hannan-Quinn criter.		9.432068
F-statistic	34.67727	Durbin-Watson stat		1.130741
Prob(F-statistic)	0.000004			

UJI T (Parsial)

Pengaruh Variabel Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan

Variabel angkatan kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan, sesuai dengan hasil regresi yang juga menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja mempunyai nilai t-statistik sebesar -0.097459 dan nilai probabilitas sebesar 0.92 > 0,05. Berdasarkan penelitian ini, tidak ada korelasi nyata antara angkatan kerja dan tingkat kemiskinan, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan semakin meningkat. Tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi atau dibantu oleh produktivitas manusia karena belum dioptimalkannya bidang ini. Salah satu strategi untuk meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu masyarakat adalah dengan meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, yang merupakan langkah awal yang cerdas ketika memperluas wilayah tersebut.

Pengaruh Variabel Upah Minimum Terhadap Kemiskinan

Variabel upah minimum mempunyai hubungan yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan yang ditunjukkan dengan temuan regresi yang menunjukkan nilai t-statistik -5.273838 dan nilai probabilitas $0.00 < 0.05$. Temuan ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan selalu digunakan untuk mengukur kenaikan upah minimum provinsi. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan di suatu daerah dengan menaikkan upah minimum dan menyediakan tenaga kerja berketerampilan tinggi atau sumber daya manusia yang produktif. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya mengenai “pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan” yang dilakukan oleh Siti Hanifah dan Nurul Hanifa (2021). Temuan studi ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi substansial antara upah minimum dan tingkat kemiskinan. Karena anggaran upah minimum telah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak, maka menaikannya setiap tahun dapat mencegah pekerja masuk ke dalam kategori kemiskinan.

UJI F (Simultan)

R-squared	0.832043	Mean dependent var	522.7276
Adjusted R-squared	0.808049	S.D. dependent var	56.57981
S.E. of regression	24.78888	Akaike info criterion	9.417452
Sum squared resid	8602.837	Schwarz criterion	9.564490
Log likelihood	-77.04834	Hannan-Quinn criter.	9.432068
F-statistic	34.67727	Durbin-Watson stat	1.130741
Prob(F-statistic)	0.000004		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai F-statistik sebesar 34.67727 dengan probabilitas $0.00 < \alpha = 0.05$ %, artinya variabel angkatan kerja dan upah minimum secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel kemiskinan

Koefisien Determinasi

R-squared	0.832043	Mean dependent var	522.7276
Adjusted R-squared	0.808049	S.D. dependent var	56.57981
S.E. of regression	24.78888	Akaike info criterion	9.417452
Sum squared resid	8602.837	Schwarz criterion	9.564490
Log likelihood	-77.04834	Hannan-Quinn criter.	9.432068
F-statistic	34.67727	Durbin-Watson stat	1.130741
Prob(F-statistic)	0.000004		

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.832043, artinya sebesar 83.20% variabel dependen yaitu kemiskinan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu angkatan kerja dan upah minimum. Sedangkan sisanya sebesar 16.8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan temuan studi mengenai dampak angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi

Yogyakarta: berdasarkan uji nilai t variabel X1 versus variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan di Yogyakarta tahun 2007–2023 dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan. Variabel angkatan kerja diketahui mempunyai nilai t-statistik sebesar -0.097459 dan nilai probabilitas sebesar $0.92 > 0.05$ yang berarti Terima H_0 atau Tolak H_1 . Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel upah minimum dengan variabel kemiskinan berdasarkan uji nilai t studi pengaruh nilai X2 terhadap variabel Y nilai t-statistik sebesar -5.273838, dan nilai probabilitas $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan H_1 disetujui dan H_0 ditolak. Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan nilai F-statistik sebesar 34,67727 dengan probabilitas $0,00 < \alpha = 0,05\%$ maka dapat dikatakan H_1 diterima dan H_0 ditolak, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kemiskinan dengan variabel angkatan kerja dan upah minimum secara bersamaan. Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel terikat yaitu kemiskinan mempunyai pengaruh sebesar 83,20% dari variabel bebas partisipasi angkatan kerja dan upah minimum, dengan nilai R^2 sebesar 0,832043. Sedangkan faktor yang tidak tercakup dalam penelitian ini memberikan dampak terhadap sisanya sebesar 16,8%.

Saran: Berdasarkan data tahun 2007 hingga 2023, upah minimum bukanlah faktor terpenting dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Yogyakarta, seperti yang telah dibahas di atas. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor tambahan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain masih diperlukan untuk mengembangkan langkah-langkah untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Yogyakarta. Para peneliti di masa depan didorong untuk melakukan penyelidikan dan studi yang lebih menyeluruh untuk memahami hubungan antara jumlah angkatan kerja, gaji minimum, dan populasi yang hidup dalam kemiskinan. Buat model simulasi untuk diperkirakan hubungan antara kemiskinan dan kebijakan ketenagakerjaan. Memperluas distribusi hasil penelitian dan kajian kepada pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, S., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh inflasi, pendidikan dan upah terhadap kesempatan kerja dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(3), 77-88.
- Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 42-61
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di indonesia. *Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan*, 1(3), 939-948.
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 85-100.